

**ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP PADA BADAN USAHA MILIK
DESA YANG ADA DI KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN
ASAHAN**

SKRIPSI

Oleh :

Devinta Indah Sari Sinaga

NIM. 0502171069

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

**ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP PADA BADAN USAHA MILIK
DESA YANG ADA DI KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN
ASAHAN
SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S. Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Devinta Indah Sari Sinaga

NIM. 0502171069

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devinta Indah Sari Sinaga
NIM : 0502171069
Tempat, Tanggal Lahir : Tinjowan, 22 Maret 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun III Desa Suka Makmur, Kecamatan Pulo
Bandring, Kabupaten Asahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 20 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



Devinta Indah Sari Sinaga

NIM. 0502171069

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP PADA BADAN USAHA MILIK
DESA DI KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN ASAHAN**

Oleh:

Devinta Indah Sari Sinaga

NIM. 0502171069

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 21 Juni 2020

Pembimbing I



Dr. Nurlaila, S.E., MA.

NIDN. 2021057503

Pembimbing II

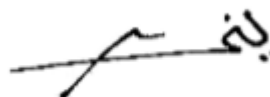


Rahmat Dajim Harahap, M.Ak

NIDN. 0126099001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty Nasution, MA.

NIDN. 2001077903

LEMBAR PENGESAHAN

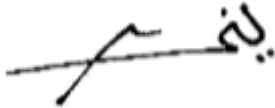
Skripsi berjudul : “ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN ASAHAN” An. Devinta Indah Sari Sinaga, NIM 0502171069 Program Studi Akuntansi Syariah telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tanggal 09 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 22 September 2021

Panitia sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Akuntansi Syariah UINSU

Ketua



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA
NIDN. 2001077903

Sekretaris



Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Anggota

Pembimbing I



Dr. Nurlaila, S.E., MA., CMA
NIDN. 2021057503

Pembimbing II



Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN. 0126099001

Penguji I



Dr. Kamilah, S.E, Ak, M.Si
NIDN. 2023107901

Penguji II



Kusmiawaty, M. Ak
NIDN. 2014068001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Devinta Indah Sari Sinaga (2021), NIM 0502171069, Skripsi berjudul, “Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan”, Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, di bawah bimbingan Ibu Nurlaila sebagai Pembimbing Skripsi I dan Bapak Rahmat Daim Harahap M.Ak sebagai Pembimbing Skripsi II.

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar entitas, yang berisi hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan dan atau aktivitas suatu entitas dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pulo Bandring sudah sesuai dengan SAK ETAP. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring sudah membuat laporan keuangan pada usahanya tetapi belum menerapkan SAK ETAP. BUMDesa Mandiri membuat laporan berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. BUMDesa Harapan Jaya tidak membuat laporan keuangan melainkan hanya buku kas saja. BUMDesa Bina Usaha membuat laporan neraca dan laporan laba rugi saja. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan pengelola BUMDesa akan akuntansi. Saran untuk hal tersebut adalah Pemerintah hendaknya mengadakan pelatihan/pembinaan kepada Pengelola BUMDesa untuk penyusunan laporan keuangan, selain itu hendaknya pemerintah membuat aplikasi akuntansi untuk BUMDesa agar memudahkan pengelola dalam menerapkan akuntansi, sehingga pengelola BUMDesa dapat membuat laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Kata Kunci : *BUMDesa, Laporan Keuangan, SAK ETAP*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat yang tak henti-hentinya dihadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Yang telah memberikan ajaran sepurna dan menjadi tauladan bagi umatnya. Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan”. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata I Program Studi Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentunya penulis mengalami banyak hambatan. Namun berkat dukungan dan motivasi dari berbagai pihak serta atas Izin Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih sedalam dalamnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah:

1. Teristimewa untuk Ibu tercinta saya Sri Wahyuni selaku orang tua penulis, Bapak Luarno selaku Paman sekaligus Ayah bagi penulis, Abangda Rizky Wahyudin Sinaga, dan Kakak Sri Meylani selaku saudara penulis, serta seluruh keluarga penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty Nasution MA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Hendra Harmain, S.E., M.PD selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Dr. Nurlaila, S.E., MA selaku pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi I yang telah banyak membantu memberikan arahan kepada penulis.
7. Rahmat Daim Harahap M.Ak selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan banyak waktu dan kesabaran dalam memberikan arahan dalam memberikan arahan kepada penulis.
8. Seluruh Staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Keluarga Besar Akuntansi Syariah khususnya kelas AKS C 2017 yang telah berjuang bersama dan memberikan semangat.
10. Terkhusus teman seperjuangan saya Alpajar Saragih dan Rica Rahmi, yang sangat banyak membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang sama kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan kemudahan bagi kita semua. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pengembangan penelitian selanjutnya. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Medan, 21 Juni 2021



Devinta Indah Sari Sinaga

NIM. 0502171069

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| SURAT PERNYATAAN | i |
| PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Batasan Masalah | 6 |
| D. Perumusan Masalah..... | 6 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 8 |
| A. Kajian Teoritis | 8 |
| 1. Laporan Keuangan | 8 |
| 2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik..... | 15 |
| 3. Badan Usaha Milik Desa..... | 26 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 32 |
| C. Kerangka Konseptual | 35 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 37 |
| A. Pendekatan Penelitian..... | 37 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 37 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian..... | 38 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 38 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| F. Teknik Analisis Data | 40 |
| 1. Pengumpulan Data | 40 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Reduksi Data | 40 |
| 3. Penyajian Data | 40 |
| 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi..... | 40 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 42 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 42 |
| B. Hasil Penelitian..... | 44 |
| 1. Penerapan SAK ETAP Pada Penyajian Laporan Keuangan BUMDesa Kecamatan Pulo Bandring | 44 |
| 2. Kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan..... | 56 |
| C. Pembahasan | 57 |
| BAB V PENUTUP..... | 59 |
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Total Modal BUMDesa Tahun 2021 | 4 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 31 |
| Tabel 3.1 Waktu Penelitian | 37 |
| Tabel 4.2 Hasil Analisis Penerapan SAK ETAP Pada BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring..... | 54 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual | 35 |
|---------------------------------------|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| 1. Daftar Wawancara..... | 65 |
| 2. Laporan Keuangan BUMDesa Mandiri Pulo Bandring | 66 |
| 3. Laporan Keuangan BUMDesa Harapan Jaya Sukadamai..... | 69 |
| 4. Laporan Keuangan BUMDesa Mandiri Pulo Bandring | 71 |
| 5. Daftar Riwayat Hidup | 73 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang sangat pesat, peranan akuntansi sangatlah penting sebagai sumber informasi mengenai transaksi keuangan yang terjadi pada suatu perusahaan. Penerapan akuntansi dilakukan guna menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan oleh pihak pengguna baik intern maupun ekstern perusahaan, laporan keuangan ini akan menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan yang akan menentukan keberlangsungan usaha dimasa depan.

Dengan penerapan akuntansi yang baik, pelaku usaha juga dapat mengetahui bagaimana perkembangan usahanya. Dalam hal pencatatan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai standar penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan kecil dan menengah atau entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu program pemerintah yang didirikan dengan maksud untuk menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan sumber pendapatan desa. Pendirian BUMDesa dapat memberikan manfaat umum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sebagai usaha desa, diharapkan pembentukan BUMDesa mampu mendorong potensi desa guna memaksimalkan aspek ekonomi, hasil alam, maupun kapasitas masyarakat dalam desa. Keberadaan BUMDesa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa, juga membuat pemerintah desa mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa sehingga dapat membantu perekonomian daerah guna menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen. Selanjutnya,

BUMDesa dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan.¹

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa”.²

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah yaitu dengan pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor essential dalam mengukur tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonominya melalui belanja daerah.³ BUMDesa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDesa adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.⁴

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi 3,

¹Dina Irawati, “*Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDesa Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDesa Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar)*” dalam Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis, SNAPER-EBIS– Jember, 27-28 Oktober 2017, hlm. 43

²Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1)

³Rahmat Daim Harahap, et.al., “*Pengaruh Dau Dan Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening*” dalam Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, Volume 5 Nomor 2 Ed. Juli–Desember 2019, hlm. 249

⁴Reza M. Zulkarnaen, “*Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*” dalam Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Volume 5 No, 1 Mei 2016, hlm. 1

yaitu pemilik, manajemen, dan pemegang saham atau investor. Sedangkan pihak eksternal yaitu kreditur dan pemerintah. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 menyebutkan “tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.”

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 12 ayat 3 menyebutkan: ”Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang (a) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan; (b) membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan; (c) memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun”.⁵

Dalam menyusun laporan keuangan, BUMDesa harus memperhatikan standar keuangan yang digunakan, artinya dalam penyusunan laporan keuangan BUMDesa harus mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Dari sekian banyak BUMDesa di Indonesia banyak yang belum dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Salah satunya yang telah penulis ketahui dari hasil kegiatan survey pendahuluan pada BUMDesa yang ada di Kecamatan Pulo Bandring belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.

Kecamatan Pulo Bandring merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan. Badan Usaha Milik Desa di Pulo Bandring bergerak di bidang permodalan yang menjalankan usaha Simpan Pinjam untuk membantu memberikan modal kepada masyarakat agar dapat meningkatkan usahanya. Modal awal Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pulo Bandring berasal dari APBDes. Dalam hal

⁵Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 12

ini tidak terdapat penyertaan modal dari masyarakat untuk BUMDes hanya bersumber dari APBDes dan laba yang dihasilkan oleh BUMDesa.

BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring telah banyak membantu masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha maupun keperluan sehari-hari. Berikut data modal usaha BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring yang sudah dan akan disalurkan sebagai pinjaman kepada masyarakat hingga saat ini:

Tabel 1.1

Total Modal BUMDesa Tahun 2021

| BUMDESA | TAHUN BERDIRI | TOTAL MODAL (2021) |
|----------------|----------------------|---------------------------|
| Mandiri | 2015 | ≥180.000.000 |
| Harapan Jaya | 2016 | ≥150.000.000 |
| Bina Usaha | 2015 | ≥228.000.000 |

Sumber: Data Primer BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring

BUMDesa juga telah memperoleh laba atas usaha tersebut. Namun, dalam hal pertanggungjawaban BUMDesa belum mampu membuat laporan keuangan secara lengkap dan akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengelola BUMDesa mengenai proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan BUMDesa.⁶

Berdasarkan penelitian pendahuluan terhadap salah satu BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring bahwasanya BUMDesa membuat laporan keuangan yang diberikan kepada Badan Pengawas BUMDesa, Sri Astuti ketua BUMDesa Bina Usaha Suka Makmur mengatakan bahwa saat menyeter memberikan laporan kepada Badan Pengawas BUMDesa diberitahu bahwa laporan keuangan yang disusun belum mencukupi, padahal beliau beranggapan bahwa laporan keuangan

⁶Wawancara dengan Ahmad Ladoni, Bendahara BUMDesa Mandiri, 14 Oktober 2020, pukul 16.30 WIB.

yang disusun sudah mencukupi semua informasi yang diperlukan.⁷ Dari penelitian pendahuluan ini penulis menemukan bahwa BUMDesa Bina Usaha dalam menyusun laporan keuangannya hanya menerapkan pencatatan akuntansi berupa buku kas harian, neraca dan laporan laba rugi, peneliti juga meninjau pada BUMDesa Harapan Jaya yang tidak membuat laporan keuangan sama sekali melainkan hanya catatan kas umum yang berisi informasi dana keluar dan masuk.⁸ Jika hal ini terus berlangsung, maka pengelolaan keuangan yang tidak tepat dapat berpotensi terhadap pengambilan keputusan yang salah dan berdampak buruk bagi kelangsungan usaha. Dalam penyusunan laporan keuangan, BUMDesa sebaiknya berpedoman pada SAK ETAP, dimana laporan keuangan lengkap yang harus disajikan meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat bagi seluruh pihak yang berkepentingan serta mencerminkan kinerja dari BUMDesa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lintong (2020) pada Badan Usaha Milik Desa Kineauan Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan tahun buku 2018 belum menunjukkan laporan keuangan yang komprehensif. Laporan hanya berbentuk catatan kas harian, kas masuk dan kas keluar, tidak menggambarkan posisi keuangan akhir periode dan tidak memberikan informasi tentang keuntungan atau kerugian entitas pada periode tertentu.⁹ Pada Penelitian yang dilakukan oleh Rudini (2016) pada Badan Usaha Milik Desa Langkitin menunjukkan bahwa pencatatan (jurnal) atas berbagai transaksi yang dilakukan Penggolongan transaksi pada BUMDesa Langkitin belum sesuai dengan SAK ETAP. Selain itu, penyajian laporan keuangan hanya terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Begitu pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2019) pada Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari dimana Laporan keuangan yang disajikan terdiri dari laporan

⁷Wawancara dengan Sri Astuti, Ketua BUMDesa Bina Usaha, 29 Januari 2021, pukul 14.20 WIB

⁸Wawancara dengan Fitri, Sekretaris BUMDesa Harapan Jaya, 25 Mei 2021 pukul 13.30

⁹Jerry Sonny Lintong, "*Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDesa 'Kineauan' Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan*" dalam Jurnal Bisnis & Kewirausahaan, Volume 16, No. 1 2020, hlm. 96

posisi keuangan, laporan laba rugi, dan perubahan ekuitas namun belum menerapkan SAK ETAP.

Dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa dengan judul “Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa Yang Ada Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam prakteknya laporan keuangan yang disusun oleh badan usaha milik desa belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengelola BUMDesa mengenai akuntansi menyebabkan SAK ETAP belum diterapkan pada Badan Usaha Milik Desa.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat dibatasi dengan penerapan akuntansi yang berfokus pada laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan?
2. Apa saja kendala dalam penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pada BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Pulo Bandring.

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Sebagai kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan penulis dalam bidang akuntansi khususnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
2. Sebagai referensi, bahan pustaka, dan wacana bagi peneliti lain
3. Bagi Badan Usaha Milik Desa, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam penerapan akuntansi sebagai rujukan untuk mengelola keuangan sehingga dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 “Laporan Keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Daftar tersebut berupa daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau rugi laba.¹⁰

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis dan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.¹¹

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan dan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan informasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada pemakainya sebagai salah satu bahan dalam

¹⁰Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2017), hlm. 5

¹¹Hery. *Pengantar Akuntansi 1*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 15

pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen.¹²

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IAI “tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, serta laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya”.¹³

Laporan keuangan menyajikan informasi perubahan posisi keuangan dan tidak diwajibkan menyediakan informasi nonkeuangan. Laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas pada satu waktu tertentu. Posisi keuangan menggambarkan sumber daya yang dikendalikan oleh sebuah entitas dan sumber pendanaan dari sumber daya tersebut.¹⁴

Laporan keuangan dapat juga disusun untuk tujuan khusus misalnya laporan keuangan yang ditujukan untuk perpajakan, regulator seperti Bank Indonesia (untuk perusahaan bank), Departemen Keuangan (untuk perusahaan lembaga keuangan non bank), maupun untuk tujuan manajemen.¹⁵

¹²Norkamsiah, et.al, “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik” dalam Jurnal Ekonomi dan keuangan, Volume 13 No.2, 2016), hlm. 154

¹³Alfurkaniati, et.al, *Pengantar Akuntansi I*. (Medan: CV Madenatera, 2017), hlm. 23

¹⁴Dwi Martani, et.al, *Akuntansi Keuangan Menengah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm.34

¹⁵Ibid., hlm. 8-9

c. Akuntansi dalam Pandangan Islam

Islam adalah agama dan pandangan hidup yang komprehensif dan universal serta terpadu. Islam sebagai Agama tidak hanya mengatur bagaimana umat beribadah kepada tuhan/saja akan tetapi ia juga mengatur bagaimana hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar/lingkungan. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Termasuk wacana bisnis. Dalam organisasi bisnis akuntansi berperan penting karena mempengaruhi segala aspek baik manajemen, sumber daya manusia, masyarakat, dan organisasi itu sendiri.¹⁶

Tujuan utama dilakukannya pencatatan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan guna mengetahui nilai kekayaan, perkiraan hutang, piutang serta kondisi perputaran uang yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya termasuk keuntungan dan kerugian suatu entitas. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi itu sendiri. Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting bagi pengguna internal dan eksternal. Pentingnya laporan keuangan menuntut penyajian laporan keuangan yang baik dan benar agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

Kajian tentang dasar-dasar, manfaat dan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi keuangan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

¹⁶Harkaneri, *Urgensi Etika dalam Akuntansi Dilihat dari Sudut Pandang Islam*, Volume 4 No, 1, 2013.

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَانْفُوا ۗ اللَّهُ ۗ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan, hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan, janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya), atau ia sendiri tidak mampu mengimlakan dengan jujur. Dan, persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantarakamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatnya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil

disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu adalah perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan, bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 282)¹⁷

Dari Surah Al-Baqarah ayat 282 ini dapat kita ketahui bahwa Islam menekankan kewajiban untuk melakukan pencatatan dalam bermuamalah atau bertransaksi sebagai bukti terjadinya transaksi tersebut, serta untuk mencegah terjadinya penipuan dan manipulasi, baik dalam transaksi itu sendiri maupun hasil transaksi (laba). Akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban, dan merupakan upaya untuk terciptanya keadilan dan kebenaran.¹⁸

Menurut Tafsir Al-Wajiz, ayat-ayat ini meliputi petunjuk Allah kepada hamba-hambanya dalam muamalah diantara mereka yaitu pemeliharaan hak-hak mereka dengan cara-cara yang bermanfaat dan kemaslahatan yang orang-orang ahli berpikir pun tak mampu memberikan sarannya yang lebih baik dan lebih sempurna darinya, karena di dalamnya banyak sekali faidah-faidahnya. Kebolehan bermuamalah dalam bentuk hutang piutang, baik berupa hutang-hutang salam atau pembelian barang yang harganya di tangguhkan, semua itu boleh di lakukan, karena Allah telah mengabarkannya berkaitan dengan kaum Mukminin, dan apa pun yang Allah kabarkan tentang kaum Mukminin, maka sesungguhnya hal itu

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surah AlBaqarah ayat 282.

¹⁸Nurlaila, Mutiara, “Penerapan Konsep Akuntansi Syariah Menurut AlBaqarah ayat 282 dalam PSAK 101” dalam *Kitabah: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, Volume 1 No. 1 Jan-Des 2015, hlm. 62

termasuk konsekuensi keimanan dan juga hal itu telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam hutang piutang wajib disebutkan tempo pembayaran dalam seluruh transaksi hutang piutang dan masa penyewaan, apabila tempo itu tidak diketahui, maka itu tidak halal, karena itu (sangat rentan) adanya tipu daya dan berbahaya, maka hal itu termasuk perjudian.

Allah memerintahkan untuk mencatat (dokumentasi hutang) piutang. Perkara yang satu ini terkadang menjadi wajib yaitu apabila wajib memelihara hak seperti seorang hamba yang wajib atasnya perwalian contohnya harta anak yatim, wakaf, perwakilan, amanah, dan terkadang juga mendekati wajib sebagaimana bila hak itu semata-mata milik seorang hamba. Dan terkadang juga lebih berat kepada wajib dan terkadang lebih berat kepada sunah, sesuai kondisi yang dituntut pada masalah itu. Dan pada intinya pencatatan itu adalah merupakan perangkat yang paling besar dalam menjaga muamalah-muamalah yang tertanggung karena rentan terjadi kelupaan dan kesalahan, dan sebagai tindakan pencegahan dari orang-orang yang tidak amanah yang tidak takut kepada Allah.¹⁹

Dalam hubungan dengan kegiatan usaha, pencatatan mutlak diperlukan, meskipun tidak terjadi transaksi hutang piutang. Pencatatan akuntansi diperlukan untuk mengetahui jumlah kekayaan dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban, berupa kewajiban pajak pada negara, pembagian keuntungan kepada pemegang saham dan juga kewajiban zakat yang harus dibayarkan apabila mencapai *nisab* dan *haul*-nya. Karena itu dalam perspektif Al-Qur'an, Akuntansi adalah suatu yang sangat penting dan wajib diterapkan.

Ada 3 nilai yang selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah, yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Ketiga nilai

¹⁹Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al Wajiz*, <https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

tersebut menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah.

1) Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait. Dalam akuntansi wujud pertanggungjawaban ini biasanya berupa laporan keuangan.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis. Dalam konteks akuntansi kata adil secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar.

3) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan contohnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran yang akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi ekonomi.²⁰

²⁰Nurlaila, Op. Cit., hlm 66-67

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

a. Pengertian SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.²¹

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan kepada ETAP dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. SAK ETAP diterbitkan tahun 2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.²²

b. Ruang Lingkup SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum

²¹Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2009) paragraf 1.1

²²Nur Fadhila Amri, *Mengenal Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, www.e-akuntansi.com/sak-etap/, diakses pada 03 Oktober 2020, pukul 13.59

(*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika:²³

- 1) Entitas telah mengajukan pertanyaan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAMLK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif.
- 2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

c. Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan menurut SAK ETAP adalah sebagai berikut:

1) Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan

²³Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2009) paragraf 1.2

bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3) Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

4) Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

5) Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6) Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias.

7) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

8) Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan

laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

9) Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

10) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat

informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.²⁴

d. Pengakuan Laporan Keuangan SAK ETAP

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut²⁵:

- 1) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan
- 2) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

SAK ETAP menjelaskan lebih lanjut mengenai pengakuan unsur laporan keuangan pada paragraf 2.32 – 2.37 sebagai berikut²⁶:

- 1) Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi namun manfaat ekonominya dianggap tidak mengalir kedalam entitas setelah periode pelaporan berjalan
- 2) Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
- 3) Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan

²⁴Ibid., paragraf 2.2 – 2.11

²⁵Ibid., paragraf 2.24

²⁶Ibid., paragraf 2.34 – 2.37

yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

- 4) Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

e. Pengukuran Laporan Keuangan SAK ETAP

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar²⁷:

- 1) Biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
- 2) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

f. Penyajian Laporan Keuangan SAK ETAP

1) Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset,

²⁷ Ibid., paragraf 2.30 – 2.31

keajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

2) Kepatuhan terhadap SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

3) Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama

dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha.

4) Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan pelaporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:

- a) fakta tersebut
- b) alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek,
- c) fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya dapat diperbandingkan.

5) Penyajian yang Konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam SAK ETAP bab 9 tentang kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan, atau SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian. Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi:

- a) sifat reklasifikasi,
- b) jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi, dan
- c) alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan :

- a) alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan, dan
- b) sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi.

6) Informasi Komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

7) Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.²⁸

²⁸Ibid., paragraf 3.2 – 3.10

g. Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Dalam SAK ETAP laporan keuangan entitas yang lengkap meliputi²⁹:

- 1) Neraca;
- 2) Laporan laba rugi;
- 3) Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
 - a) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - b) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- 4) Laporan arus kas; dan
- 5) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

h. Manfaat Penerapan SAK ETAP

SAK ETAP memiliki beberapa manfaat untuk diterapkan, diantaranya adalah dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, diharapkan mampu untuk: Menyusun laporan keuangannya sendiri, agar dapat diaudit dan mendapatkan opini audit. Laporan keuangan yang telah diaudit dapat digunakan salah satunya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha.

SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya, namun tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.³⁰

²⁹Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2016), h. 136

³⁰Nur Fadhila Amri, *Mengenal Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, www.e-akuntansi.com/sak-etap/, diakses pada 03 Oktober 2020, pukul 13.59

3. Badan Usaha Milik Desa

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³¹

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.³²

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan disertai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diharapkan mendorong desa untuk mengelola sumber daya yang ada di desa, termasuk pengembangan ekonomi masyarakatnya. Salah

³¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014

³²Andi Prasetyawan Hamzah, et. al, “*Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dalam Pelaporan Keuangan Pada BUM Desa Tirta Mandiri Desa Ponggok Klaten*” dalam Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 1, No. 3, November 2019, hlm. 199

satu cara untuk mengelola ekonomi masyarakat desa adalah dengan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).³³

Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDesa dibangun atas inisiasi masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDesa benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri.³⁴

b. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar-Desa.³⁵ Tujuan pendirian BUMDesa sebagaimana disebutkan dalam Bab II Pasal 3 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, No. 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu:³⁶

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa, dengan adanya Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu meningkatkan perekonomiannya, yaitu dengan cara ikut serta dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

³³Putri Nugrahaningsih, et. Al, “*Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*” dalam Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 16 No. 1, 2016, hlm. 38

³⁴Coristya Berlian Ramadana, et. al, “*Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*” dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, No. 6, hlm. 1073

³⁵Permendesa PDPTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2

³⁶Ibid., Pasal 3

- 2) Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- 6) Membuka lapangan kerja
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

c. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Landasan hukum pendirian BUMDesa adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.³⁷

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa: “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa

³⁷Bina Bangun Bangsa, 2020, *Landasan Hukum dalam Pembentukan dan Pelaksanaan BUM Desa*, www.infoBUMDesa.id, diakses pada tanggal 25 September 2020, pukul 23.24

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.³⁸

Sedangkan untuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada beberapa pasal diantaranya yaitu³⁹:

Pasal 87

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa
- 2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan
- 3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 88

- 1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa
- 2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa

d. Jenis Usaha

Jenis usaha yang ada di dalam BUMDesa, diantaranya yaitu:

- 1) *Serving*

Serving adalah jenis BUMDesa yang fokus menjalankan bisnis sosial untuk pelayanan publik/masyarakat. Jenis usaha ini

³⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014

³⁹Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

tidak berfokus pada keuntungan (nirlaba). Contohnya lumbung pangan, usaha listrik desa, penyulingan air bersih, dan lainnya.

2) *Banking*

Banking adalah jenis BUM Desa berbentuk bisnis keuangan yaitu dengan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Contohnya unit usaha dana bergulir, simpan pinjam, Bank Desa, dan lainnya.

3) *Renting*

Renting adalah jenis badan usaha desa dibidang penyewaan yaitu dengan menyediakan persewaan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya persewaan traktor, penyewaan rumah dan toko, tanah, gedung dan lain sebagainya.

4) *Brokering*

Brokering atau perantara adalah jenis BUMDesa berupa lembaga perantara yang menghubungkan antara satu pihak dan pihak lainnya yang memiliki tujuan sama. Dalam desa yang sering dilaksanakan adalah menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar dengan tujuan agar petani tidak sulit mencari konsumen dan menjual hasil sawah nya. Jenis usaha ini juga bisa disebut dengan jenis usaha yang menjual pelayanan kepada warga dan usaha kecil masyarakat. Contohnya jasa pembayaran listrik, PAM, Telepon, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor dan lainnya.

5) *Trading*

Trading adalah jenis BUMDesa yang memfokuskan usahanya dalam produksi dan berdagang barang-barang tertentu dalam sebuah pasar dengan skala yang luas untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat. Contohnya pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, hasil peternakan dan lain sebagainya.

6) *Holding*

Holding adalah salah satu jenis badan usaha yang sering disebut dengan usaha bersama yaitu sebuah unit dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana setiap unit yang berdiri sendiri, yang diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDesa agar tumbuh dan berkembang bersama. Contohnya desa wisata yang mengordinir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat seperti kerajinan, makanan, sajian wisata, kesenian, penginapan dan lainnya.

7) *Contracting*

Contracting atau kerja kontrak adalah jenis BUMDesa berupa usaha kemitraan yang dilaksanakan oleh unit usaha dalam BUMDesa bekerjasama dengan Pemerintah Desa atau pihak yang lainnya. Contohnya pembangunan sarana prasarana seperti aspal jalan dan lain sebagainya.⁴⁰

⁴⁰[www.pelajaran.co.id, badan-usaha-milik-desa](http://www.pelajaran.co.id/badan-usaha-milik-desa), diakses pada tanggal 26 September, Pukul 18.46

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan referensi oleh penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

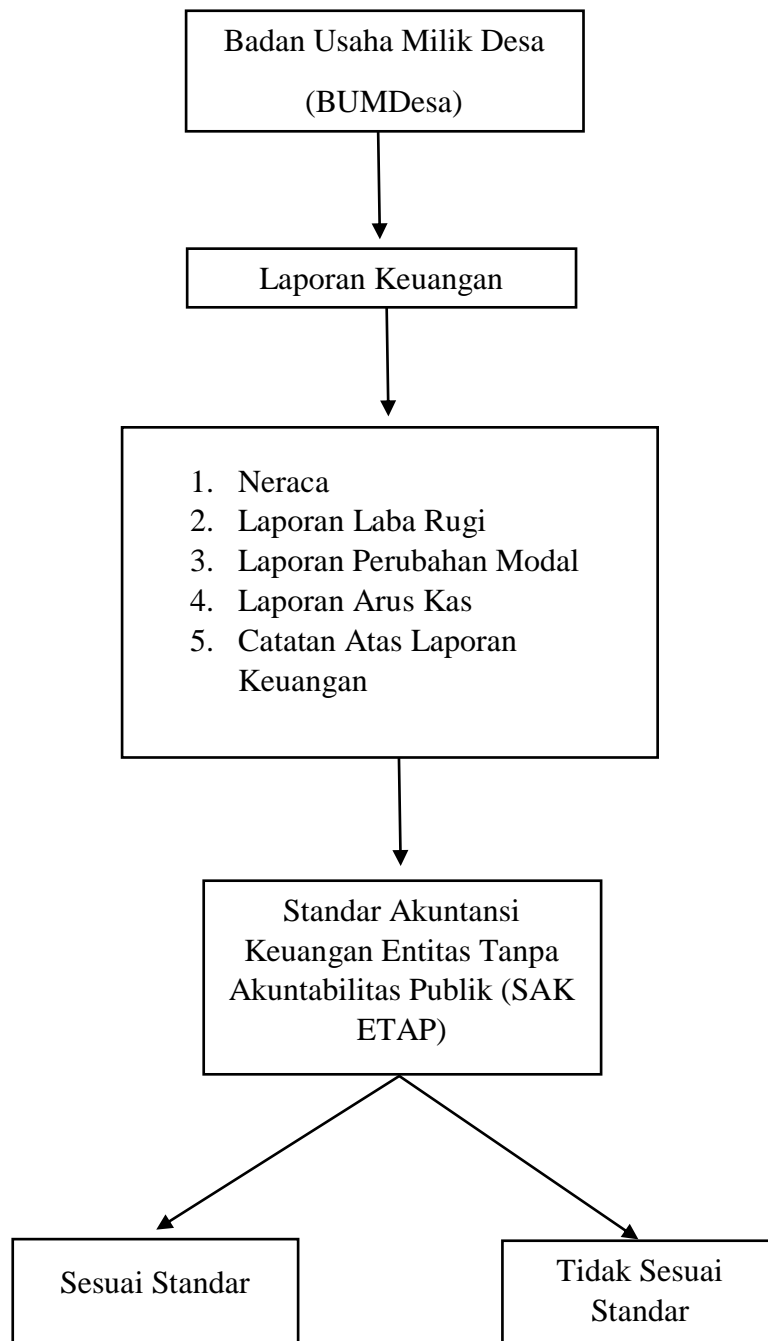
| No | Nama | Judul | Penelitian | | Hasil Penelitian |
|----|--|--|---|---|---|
| | | | Persamaan | Perbedaan | |
| 1. | Jerry Sonny Lintong, Esrie A. N. Limpeleh, Barno Sungkowo (2020) | Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDesa “Kineauan” Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan | 1. Sama-sama meneliti SAK ETAP 2. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif 3. Menggunakan teknik analisis data yang sama | 1. Waktu penelitian 2. Tempat penelitian | Laporan keuangan yang dibuat hanya berupa laporan kas harian, menggambarkan kas masuk dan kas keluar. Tidak menggambarkan posisi keuangan akhir periode dan tidak memberikan informasi tentang keuntungan atau kerugian entitas pada periode. |
| 2. | Rudini, Nurhayati, Afriyanto (2016) | Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) | 1. Sama-sama meneliti SAK ETAP 2. Sama-sama menggunakan | 1. Waktu penelitian 2. Tempat penelitian | Pencatatan (jurnal) atas berbagai transaksi yang dilakukan belum sesuai dengan SAK ETAP dan hanya |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| | | Langkitin Di Desa Langkitin | pendekatan kualitatif | | menyajikan neraca dan laporan laba rugi |
| 3. | Mega Intan Octaviani (2019) | Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari di Desa Panggunharjo | 1. Sama-sama meneliti SAK ETAP 2. Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif | 1. Waktu penelitian 2. Tempat penelitian | Laporan keuangan yang disajikan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas yang memiliki standar akuntansi umum tetapi belum menerapkan SAK ETAP. |
| 4. | Norkamsiah, Agus Iwan Kesuma, Agus Setiawaty (2016) | Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Penyusunan Laporan Keuangan | 1. Sama-sama meneliti SAK ETAP 2. Sama sama menggunakan metode deskriptif kualitatif | 1. Waktu penelitian 2. Objek penelitian | Laporan keuangan yang disusun oleh CV Aba Komputer belum menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP) dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber manusia yang dimiliki. |
| 5. | Pipin Hariasih, Moh. Hudi | Financial Statement Based On Financial | 1. Sama-sama meneliti | 1. Objek penelitian | Laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK ETAP |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| | Setyobakti, Deni Juliasari(2020) | Statements Based On Financial Accounting Standards For Entities Without Public Accountability | tentang SAK ETAP | 2. Jenis penelitian Kuantitatif | bentuknya masih sangat sederhana dan belum sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. |
| 6. | Hendra Aditya, Agung Praptapa, Christina Tri Setyorini (2015) | The Challenges of Implementation Accounting Standards for Entities without Public Accountability on Small and Medium Entreprises | 1. Sama-sama meneliti tentang SAK ETAP 2. Sama-sama meneliti kendala penerapan SAK ETAP | 1. Waktu penelitian 2. Objek penelitian | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini sebagian besar pelaku usaha menengah belum menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan pemahaman SAK ETAP yang masih rendah. |
| 7. | Deswati Supra | Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Dalam Penyajian Laporan Keuangan | 1. Sama-sama meneliti SAK ETAP 2. Sama sama menggunakan metode deskriptif kualitatif | 1. Waktu penelitian 2. Objek penelitian | Hasil penelitian bahwa SAK ETAP belum diterapkan dengan baik dan benar |

C. Kerangka Konseptual

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu program pemerintah yang didirikan dengan maksud untuk menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan sumber pendapatan desa. Berdasarkan kerangka teori dibawah ini dalam menjalankan usaha mestinya BUMDesa melakukan pencatatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yaitu yang terdiri dari: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada penelitian ini peneliti akan membandingkan laporan keuangan yang telah disusun oleh BUMDesa untuk dapat dilihat kesesuaiannya dengan SAK ETAP.



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam jenis penelitian ini, peneliti berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cermat tanpa berusaha melakukan hipotesa akan tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi serta membandingkan penyajian laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa dengan SAK ETAP untuk kemudian dapat diambil kesimpulan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka lokasi penelitian secara langsung dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.

2. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai dengan Juni 2021.

⁴¹Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, cet xxvi, 2009), h. 4

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah narasumber atau informan yang menjadi sumber data dalam penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa termasuk pengelola BUMDesa yaitu Ketua/Sekretaris/Bendahara sebagai sumber untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah topik yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa..

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang didapatkan melalui analisis yang dilakukan dengan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dan menjawab rumusan masalah mengenai penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi terhadap suatu benda,

kejadian, atau kegiatan maupun hasil pengujian.⁴² Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Pengelola BUMDesa yaitu pihak-pihak yang berkaitan dalam penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data ini diperoleh dari artikel, publikasi-publikasi di internet, buku literatur dan tulisan-tulisan yang dapat digunakan sebagai acuan yang bisa mendukung penelitian ini.⁴³ Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa teori, kajian literatur, dan penelitian terdahulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.⁴⁴ Wawancara dilakukan kepada Pengelola Badan Usaha Milik Desa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴⁵ Peneliti memperoleh data yang berasal dari artikel dan jurnal terdahulu sebagai pendukung penelitian. Peneliti juga menggunakan dokumen berupa catatan dan laporan keuangan milik Badan Usaha Milik Desa yang akan dianalisis kesesuaiannya dengan SAK ETAP.

⁴²Arfan Ikhsan, Misri, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Medan: Citapustaka Media, 2014), h. 122

⁴³Ibid., hal. 147

⁴⁴Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hlm. 137

⁴⁵A. M. Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014)

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Tahapan dalam analisa data yaitu⁴⁶:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara sesuai dengan data yang dibutuhkan dan tahap ini akan berhenti apabila data yang diterima sudah mencukupi.

2. Reduksi Data

Tahapan ini bertujuan memilih dan menyederhanakan data-data yang memiliki jumlah cukup banyak kemudian dengan caramencatat secara teliti dan rinci laludianalisis melalui reduksi data. Dalam hal ini, peneliti akan merangkum, dan memilih data-data pokok yang diperlukan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data

Penyajian data bisa diuraikan dalam uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, kemudian menyusun rencana kerja berdasarkan pemahaman tersebut.

Dalam penyajian data penulisan akan menyajikan laporan keuangan yang telah disusun oleh BUMDesa untuk dapat dibandingkan dan dilihat kesesuaiannya dengan SAK ETAP.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara lengkap

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.241

akan dibuat dasar dalam perumusan kesimpulan oleh peneliti. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan akhir perlu diverifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Pulo Bandring merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Pulo Bandring terdiri dari 10 Desa, diantaranya: Suka Makmur, Sukadamai, Sukadamai Barat, Taman Sari, Tanah Rakyat, Bunut Sebrang, Gedangan, Perhutaan Silau, Sidomulyo, dan Pulo Bandring. BUMDesa yang terdapat di Kecamatan Pulo Bandring mengelola usaha jasa simpan pinjam, beberapa BUMDesa juga terdapat unit usaha jasa online seperti transfer uang dan tarik tunai, pengisian pulsa, pembayaran tagihan listrik, air, dan sebagainya. Badan usaha milik desa dikelola oleh pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Modal awal Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pulo Bandring berasal dari APBDes, hal ini sesuai dengan PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 135 ayat 1 “Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes”.⁴⁷ Dalam hal ini tidak terdapat penyertaan modal dari masyarakat untuk BUMDes hanya bersumber dari APBDes dan laba yang dihasilkan oleh BUMDes.

Penelitian ini dilakukan pada 3 BUMDesa di kecamatan Pulo Bandring yang masih aktif hingga saat ini (2021) diantaranya: BUMDesa Mandiri milik Desa Pulo Bandring, BUMDesa Harapan Jaya milik desa Sukadamai dan BUMDesa Bina Usaha milik desa Sukamakmur.

1. BUMDesa Mandiri Pulo Bandring

BUMDesa Mandiri didirikan pada tahun 2015 yang merupakan Badan Usaha Milik Desa Pulo Bandring. BUMDesa ini menjalankan usaha simpan pinjam dan jasa online brilink. Pada layanan simpan pinjam Masyarakat dapat mengajukan pinjaman dana kepada BUMDesa Mandiri mulai dari Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000 yang dicicil selama 10 bulan. Dalam hal ini BUMDesa Mandiri mendapatkan laba yang diperoleh dari niaya jasa yang ditetapkan sebesar 15% dari jumlah pinjaman. Sejak

⁴⁷Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Pasal 135 ayat (1)

didirikan hingga saat ini BUMDesa telah banyak membantu perekonomian masyarakat dan BUMDesa juga mendapatkan laba atas usaha tersebut yang digunakan sebagai penambah modal, penguatan PADes, bantuan dana sosial, dan lain-lain.⁴⁸

Daftar Pengelola BUMDesa Mandiri Pulo Bandring sebagai berikut:

Ketua : Putri Abdurachman

Sekretaris : Rismayani

Bendahara : Ahmad Ladoni

2. BUMDesa Harapan Jaya Sukadamai

BUMDesa Harapan Jaya dibentuk pada tahun 2015 dan mulai menjalankan usahanya pada tahun 2016. BUMDesa Harapan Jaya memiliki jenis usaha simpan pinjam. Pada usaha simpan pinjam ini, masyarakat dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp 1.000.000 limit pinjaman dapat bertambah berdasarkan riwayat kelancaran pembayaran hingga maksimal Rp 5.000.000 dan pembayaran menggunakan sistem cicilan selama 12 bulan, BUMDesa memperoleh laba dari biaya jasa yang ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan cicilan, biaya jasa ini sebesar 12% per tahun atau 1% per bulan yang dibayarkan bersamaan dengan cicilan pokok.⁴⁹

Daftar Pengelola BUMDesa Harapan Jaya Sukadamai sebagai berikut:

Ketua : Candra Winata

Sekretaris : Fitri Marantika

Bendahara : Erna Pulungan

⁴⁸Wawancara dengan Ahmad Ladoni, Bendahara BUMDesa Mandiri Pulo Bandring, 24 April 2021, Pukul 13.30

⁴⁹Wawancara dengan Fitri, Sekretaris BUMDesa Harapan Jaya Sukadamai, 25 Mei 2021, Pukul 13.30

3. BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur

BUMdesa Bina Usaha didirikan pada tahun 2015 dan menjalankan usaha simpan pinjam. Pada BUMDesa Mandiri masyarakat dapat mengajukan pinjaman baik untuk modal usaha maupun kebutuhan sehari-hari, pada peminjaman pertama maksimal Rp 1.000.000, dan limit pinjaman dapat bertambah pada peminjaman berikutnya hingga maksimal Rp 10.000.000. BUMDesa Mandiri memperoleh laba dari biaya jasa yang ditetapkan atas pinjaman yaitu sebesar 18% yang mana pinjaman dana dan biaya jasa dibayar dengan cicilan selama 12 bulan.⁵⁰

Daftar Pengelola BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur sebagai berikut:

Ketua : Sri Astuti
 Sekretaris : Nora Vitasari
 Bendahara : Suwarni

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan SAK ETAP Pada Penyajian Laporan Keuangan BUMDesa Kecamatan Pulo Bandring

a. Laporan Keuangan Lengkap

1) BUMDesa Mandiri Pulo Bandring

Laporan keuangan yang disusun oleh BUMDesa Mandiri menggunakan sistem pencatatan single entry yang dibuat oleh pengelola BUMDesa. Pencatatan keuangan dengan sistem single entry ini dianggap sudah mampu memberikan informasi keuangan bagi pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut. Hal ini dikarenakan pencatatan single entry lebih mudah dipahami. Berikut catatan dan laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDesa:

⁵⁰Wawancara dengan Sri Astuti, Ketua BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur, 31 Mei 2021, Pukul 11.30

a) Buku kas harian

Buku kas harian merupakan catatan yang dibuat oleh BUMDesa Mandiri yang terdiri dari akun pemasukan dan pengeluaran, buku kas ini mencatat pemasukan yang diperoleh dari pengembalian dana pinjaman masyarakat setiap bulannya juga pengeluaran kas yang berupa pinjaman masyarakat.

Pada konsep akuntansi pencatatan transaksi dilakukan dengan penjurnalan dengan double entry, contohnya pada kasus buku kas harian ini yang mencatat penambahan dan pengurangan piutang, pengurangan piutang di jurnal dengan kas di debit dan piutang di kredit, namun pada pencatatan yang dibuat oleh BUMDesa Mandiri hanya sebatas catatan berupa jumlah dana yang keluar dan masuk saja.

b) Laporan Keuangan

Dalam SAK ETAP (2009) pada Bab 3 tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan lengkap suatu entitas terdiri dari: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, ini artinya BUMDesa harus menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan pedoman SAK ETAP.

(a) Neraca

BUMDesa Mandiri menyajikan Neraca yang berisi aktiva berupa asset lancar dan asset tidak lancar dan pasiva yang berisi informasi mengenai kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh BUMDesa.

(b) Laporan Laba Rugi

BUMDesa Mandiri menyajikan laporan laba rugi dimana pada laporan yang disajikan terdiri dari jumlah laba kotor yang dihitung dari laba yang diperoleh atas biaya jasa unit usaha, dikurangi dengan jumlah total biaya operasional yang dikeluarkan. Hal ini kurang sesuai dengan konsep SAK ETAP dimana pada sak etap laporan laba rugi terdiri dari total pendapatan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan sehingga menghasilkan laba kotor. Pada laporan ini BUMDesa juga mencantumkan informasi mengenai kemana laba yang diperoleh akan dialokasikan.

(c) Laporan Perubahan Ekuitas

BUMDesa Mandiri adalah laporan perubahan modal, dimana laba/rugi terdiri dari total keseluruhan modal ditambah dengan surplus modal yang diperoleh dari alokasi laba.

(d) Laporan Arus Kas

Dalam laporan keuangan BUMDesa Mandiri tidak menyajikan laporan arus kas yang berisi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan dalam transaksi yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa.

(e) Catatan atas Laporan Keuangan

BUMDesa tidak membuat catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Hal ini belum sesuai dengan SAK ETAP yang mensyaratkan

Entitas harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan penuh pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

2) BUMDesa Harapan Jaya Sukadamai

a. Buku Kas Umum

Dalam pencatatannya BUMDesa Harapan Jaya hanya melakukan pencatatan pada buku kas umum. Buku kas umum ini berisi informasi mengenai catatan dana keluar dan sisa saldo kas yang dimiliki BUMDesa Mandiri. Buku kas umum dirangkum setiap bulan sehingga berisi 12 bulan catatan dana keluar dan masuk untuk disusun menjadi laporan pertanggungjawaban.

b. Laporan Keuangan

BUMDesa Harapan Jaya tidak menyusun laporan keuangan lengkap berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laba dihitung berdasarkan perkiraan biaya jasa yang telah diperoleh selama satu tahun, dan hanya ditulis di kertas coretan-coretan saat pembagian laba dan sisa hasil usaha untuk dialokasikan oleh pengelola BUMDesa. Sehingga tidak diketahui dengan pasti berapa laba yang diperoleh.

3) BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur

a) Buku Kas Harian

Buku kas harian merupakan laporan yang dibuat oleh BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur untuk pencatatan keluar masuknya kas. Pada buku kas harian berisi informasi mengenai kas masuk yang berasal dari setoran cicilan (termasuk biaya jasa) dan penambahan modal dari laba BUMDesa maupun penambahan modal dari APBDes. Buku kas harian juga

mencatat pengeluaran berupa pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat dan pengeluaran biaya operasional.

b) Laporan Keuangan

(a) Neraca

Neraca menyajikan aktiva yang berisi asset lancar dan asset tidak lancar dan pasiva yang berisi informasi mengenai kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh BUMDesa.

(b) Laporan Laba Rugi

BUMDesa Bina Usaha juga menyajikan laporan laba rugi dimana pada laporan yang disajikan terdiri dari jumlah laba kotor yang dihitung dari laba yang diperoleh atas biaya jasa unit usaha, dikurangi dengan jumlah total biaya operasional yang dikeluarkan.

(c) Laporan Perubahan Ekuitas

BUMDesa Bina Usaha tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas.

(d) Laporan Arus Kas

BUMDesa Bina Usaha tidak menyajikan laporan arus kas.

(e) Catatan atas Laporan Keuangan

BUMDesa Bina Usaha tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan.

b. Penyajian Laporan Keuangan

1) Badan Usaha Milik Desa Mandiri Pulo Bandring

a) Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif.⁵¹

Dan dari pencatatan yang dilakukan oleh BUMDesa Mandiri Pulo Bandring belum bisa dikatakan wajar dari segi kewajaran penyajian laporan keuangan karena tidak memperhatikan kriteria pengakuan aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan beban.

b) Kepatuhan terhadap SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.⁵²

Dari segi kepatuhan terhadap SAK ETAP, BUMDesa Mandiri Pulo Bandring belum memenuhi kepatuhan terhadap SAK ETAP dikarenakan belum membuat laporan keuangan yang lengkap dan tidak memiliki catatan atas laporan keuangan yang memuat pernyataan eksplisit dan penuh mematuhi SAK ETAP.

⁵¹Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) paragraf 3.2

⁵²Ibid., paragraf 3.3

c) Kelangsungan Usaha

Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut.⁵³

Dalam hal ini BUMDesa Mandiri Pulo Bandring masih menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya berjalan dengan baik, pengelola tidak hanya berfokus mengelola usahanya dalam kegiatan operasional kegiatan usahanya tetapi juga membuat penilaian atas kemampuan usaha sehingga dapat dibuat keputusan untuk kelangsungan usaha.

d) Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali.⁵⁴

BUMDesa Mandiri Pulo Bandring menyajikan laporan keuangan satu tahun sekali, namun laporan keuangan yang disajikan belum lengkap.

e) Penyajian yang Konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten.⁵⁵

Dalam penyajian laporan keuangan BUMDesa Mandiri Pulo Bandring belum konsisten dan klasifikasi pos pos dalam laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP.

⁵³Ibid., paragraf 3.4

⁵⁴Ibid., paragraf 3.5

⁵⁵Ibid., paragraf 3.6

f) Informasi Komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.⁵⁶

BUMDesa Mandiri Pulo Bandring belum memasukkan informasi komparatif, laporan keuangan telah dibuat dan pada dasarnya bersifat komparatif, namun hal ini hanya dapat dipahami oleh internal saja karena penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAK ETAP.

g) Materialitas

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.⁵⁷

BUMDesa Mandiri Pulo Bandring membuat laporan keuangan yang kurang memperhatikan tingkat materialitas suatu transaksi. Dalam penyajian laporan keuangan contohnya pada pos beban tidak diklasifikasikan berdasarkan sifat dan fungsinya.

2) Badan Usaha Milik Desa Harapan Jaya

a) Penyajian Wajar

Dari pencatatan yang dilakukan oleh BUMDesa Harapan Jaya belum bisa dikatakan wajar dari segi kewajaran penyajian

⁵⁶Ibid., paragraf 3.9

⁵⁷Ibid., paragraf 3.10

laporan keuangan karena tidak memperhatikan kriteria pengakuan aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan beban.

b) Penyajian Wajar

Dari pencatatan yang dilakukan oleh BUMDesa Harapan Jaya belum bisa dikatakan wajar dari segi kewajaran penyajian laporan keuangan karena tidak memperhatikan kriteria pengakuan aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan beban.

c) Kepatuhan terhadap SAK ETAP

BUMDesa Harapan Jaya belum bisa dikatakan patuh terhadap SAK ETAP, dikarenakan belum membuat laporan keuangan yang lengkap dan tidak memiliki catatan atas laporan keuangan yang memuat pernyataan eksplisit dan penuh mematuhi SAK ETAP.

d) Kelangsungan Usaha

BUMDesa Harapan Jaya masih menjalankan usaha dan operasionalnya berjalan dengan baik, serta tidak bermaksud untuk melikuidasi entitas. Pengelola membuat penilaian atas kemampuan usaha sehingga dapat dibuat keputusan untuk kelangsungan usaha.

e) Frekuensi Pelaporan

Entitas harus menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. BUMDesa Harapan Jaya terkadang tidak menyajikan laporan keuangan setiap tahun.

f) Penyajian yang Konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten. Dalam penyajian laporan keuangan

BUMDesa Harapan Jaya belum konsisten dan klasifikasi pos pos dalam laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP.

g) Informasi Komparatif

BUMDesa Harapan Jaya belum memasukkan informasi komparatif, laporan keuangan telah dibuat dan pada dasarnya bersifat komparatif, namun hal ini hanya dapat dipahami oleh internal saja karena penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAK ETAP.

h) Materialitas

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

BUMDesa Harapan Jaya membuat laporan keuangan yang kurang memperhatikan tingkat materialitas suatu transaksi. Dalam penyajian laporan keuangan pos beban tidak dipisahkan dan diklasifikasikan berdasarkan sifat dan fungsinya.

3) Badan Usaha Milik Desa Mandiri Sidomulyo

a) Penyajian Wajar

Penyajian Laporan Keuangan BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur belum bisa dikatakan wajar karena tidak memperhatikan kriteria pengakuan aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan beban.

b) Kepatuhan terhadap SAK ETAP

BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur belum membuat laporan keuangan yang lengkap dan tidak memiliki catatan atas laporan keuangan yang memuat pernyataan eksplisit

dan penuh mematuhi SAK ETAP. Sehingga BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur tidak bisa dikatakan patuh terhadap SAK ETAP.

c) Kelangsungan Usaha

BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur membuat penilaian atas kemampuan usaha sehingga dapat dibuat keputusan untuk kelangsungan usaha. BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur menjalankan usaha dan operasionalnya berjalan dengan baik, serta tidak bermaksud untuk melikuidasi entitas.

d) Frekuensi Pelaporan

Entitas harus menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur menyajikan laporan keuangan satu tahun sekali, namun laporan keuangan yang disajikan belum lengkap dan belum sesuai dengan SAK ETAP.

e) Penyajian yang Konsisten

Dalam penyajian laporan keuangan BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur belum konsisten dan klasifikasi pos pos dalam laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP.

f) Informasi Komparatif

BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur belum memasukkan informasi komparatif, laporan keuangan telah dibuat dan pada dasarnya bersifat komparatif, namun hal ini hanya dapat dipahami oleh internal saja karena penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAK ETAP.

g) Materialitas

BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur belum memperhatikan pengakuan pos pos yang dinilai material.

Adapun hasil dari penelitian penerapan Akuntansi berdasarkan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pulo Bandring dapat dijelaskan menggunakan tabel sebagai berikut:

Keterangan: \surd = Ya

- = Tidak

Tabel 4.1

Hasil Analisis Penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pulo Bandring

| SAK ETAP | | BUMDesa | | |
|--|-------------------------------|---------|--------------|------------|
| | | Mandiri | Harapan Jaya | Bina Usaha |
| Unsur- unsur laporan keuangan | Neraca | \surd | - | \surd |
| | Laporan Laba Rugi | \surd | - | \surd |
| | Laporan Perubahan Ekuitas | \surd | - | - |
| | Laporan Arus Kas | - | - | - |
| | Catatan Atas Laporan Keuangan | - | - | - |
| Penyajian laporan keuangan | Penyajian Wajar | - | - | - |
| | Kepatuhan terhadap SAK ETAP | - | - | - |
| | Kelangsungan Usaha | \surd | \surd | \surd |
| | Frekuensi Pelaporan | - | - | - |
| | Penyajian yang Konsisten | - | - | - |
| | Informasi Komparatif | - | - | - |
| | Materialitas | - | - | - |
| | Laporan Keuangan Lengkap | - | - | - |

Sumber: Data diolah dari BUMDesa Bina Usaha 2016, BUMDesa Harapan Jaya 2018, BUMDesa Mandiri 2020

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari ketiga BUMDesa yang ada di kecamatan Pulo Bandring yakni BUMDesa Mandiri Pulo Bandring, BUMDesa Mandiri dan BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur dalam penyajian laporan keuangannya hanya menerapkan kelangsungan usaha. Ketiga BUMDesa telah membuat laporan keuangan namun belum lengkap sesuai dengan SAK ETAP. Meskipun BUMDesa Mandiri Pulo Bandring dan BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur telah membuat laporan keuangan yang disusun setiap periode, tetapi tidak membuat laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sehingga belum dapat dikatakan sesuai dengan SAK ETAP, bahkan dapat dilihat hanya BUMDesa Mandiri Pulo Bandring yang menyusun laporan perubahan ekuitas.

2. Kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Pulo Bandring belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini tentu saja karena adanya faktor penghambat yang menyebabkan sulitnya pengelola BUMDesa melakukan pencatatan yang sesuai dengan konsep akuntansi. Penulis mengalisis terdapat beberapa hal yang menyebabkan SAK ETAP belum diterapkan pada Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Pulo Bandring sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan pemahaman SDM mengenai konsep dan standar akuntansi masih terbatas
- b. Kurangnya kesadaran pengelola BUMDesa akan pentingnya laporan keuangan yang benar dan tepat bagi usaha yang sedang dijalankan
- c. Pembuatan laporan yang masih dianggap rumit dan membutuhkan waktu lama dalam pembuatannya.
- d. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah setempat mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar keuangan.

- e. Belum adanya pendampingan dan pelatihan di Kecamatan Pulo Bandring terkait penyusunan laporan keuangan dan penerapan standar akuntansi.

C. Pembahasan

Penerapan akuntansi untuk BUMDesa berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Berdasarkan SAK ETAP oleh Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan yang mematuhi persyaratan SAK ETAP dan laporan keuangan yang lengkap adalah apabila memenuhi: penyajian wajar, kepatuhan terhadap SAK ETAP, kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, penyajian yang konsisten, informasi komparatif, materialitas, dan laporan keuangan lengkap. Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pulo Bandring dapat disimpulkan sebagai berikut:

BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring sudah membuat laporan keuangan pada usahanya tetapi tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Dalam pencatatan atau pembukuan semua transaksi dari kegiatan usaha tidak semua mengikuti ketentuan akuntansi yang benar seperti jurnal, buku besar dan ketentuan akuntansi lainnya. BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring memiliki pencatatan berupa buku kas yang berisi informasi pengeluaran dan pemasukan kas. BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring dalam pencatatan dan pembukuannya masih berdasarkan pemahaman pengelola saja. Menurut pengelola BUMDesa yang terpenting adalah laporan keuangan yang dibuat mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan pengelola tidak begitu memahami tentang standar akuntansi, sehingga laporan keuangan yang telah dibuat dirasa sudah cukup menjadi informasi keuangan bagi BUMDesa.⁵⁸

Laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring belum sesuai dengan SAK ETAP dikarenakan hanya memuat neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas, BUMDesa tidak memiliki laporan

⁵⁸ Wawancara dengan Fitri, Bendahara BUMDesa Harapan Jaya, 25 Mei 2021, Pukul 13.30

arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Bahkan BUMDesa Harapan Jaya Sukadamai tidak membuat laporan keuangan sama sekali, melainkan hanya catatan buku kas saja.

Dalam hal penyajian laporan keuangan juga dinilai belum memenuhi SAK ETAP. Pada Penyajian Wajar BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring belum bisa dikatakan wajar karena tidak memperhatikan kriteria pengakuan aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan beban. Dari segi kelangsungan Usaha BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring menjalankan usaha dan operasionalnya dengan baik. BUMDesa juga telah membuat laporan keuangan sesuai dengan frekuensi pelaporan yaitu minimum satu tahun sekali, akan tetapi laporan yang disajikan belum lengkap. Pos-pos dalam laporan keuangan belum konsisten dan belum diklasifikasikan sesuai dengan SAK ETAP. Laporan keuangan yang disajikan juga belum memasukkan informasi komparatif, walaupun pada dasarnya laporan keuangan telah dibuat dan bersifat komparatif, namun hal ini hanya dapat dipahami oleh internal BUMDesa saja karena penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring juga belum sepenuhnya memisahkan pos pos yang material, pos-pos umum yang telah dipisahkan berupa aset, kewajiban, dan modal, namun untuk pos beban tidak diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan fungsinya.

Dari hasil penelitian didapatkan juga bahwa BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring memiliki kendala dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP karna pengetahuan yang dimiliki oleh pengelola BUMDesa mengenai akuntansi dan SAK ETAP masih terbatas, pengelola berpendapat bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi, dan pada kegiatan pembimbingan BUMDesa oleh pemerintah setempat tidak diajarkan cara membuat laporan keuangan sesuai SAK ETAP tersebut. Hal ini menyebabkan BUMDesa belum mampu menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan dan belum dapat membuat laporan keuangan yang lengkap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai penerapan SAK ETAP pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring sudah membuat laporan keuangan pada usahanya tetapi tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring dalam pencatatan dan pembukuannya masih berdasarkan pemahaman pengelola saja. Adapun laporan keuangan yang dimiliki BUMDesa di Kecamatan Pulo Bandring adalah sebagai berikut:
 - a. BUMDesa Mandiri Pulo Bandring memiliki pencatatan buku kas, dan laporan berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas, BUMDesa Mandiri tidak menyusun laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
 - b. BUMDesa Harapan Jaya Sukadamai hanya melakukan pencatatan pada buku kas umum, tidak membuat laporan lengkap sesuai SAK ETAP.
 - c. BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur memiliki catatan buku kas harian, dan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi saja.

Dalam hal penyajian laporan keuangan juga dinilai belum memenuhi SAK ETAP baik dari segi Penyajian Wajar, Frekuensi Pelaporan, Penyajian yang Konsisten, Informasi Komparatif, maupun Materialitas. Dalam hal ini ketiga BUMDesa hanya menerapkan Kelangsungan Usaha.

2. Adapun kendala kendala dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP karna pengetahuan pengelola BUMDesa mengenai akuntansi dan SAK ETAP masih terbatas, pengelola berpendapat bahwa

laporan keuangan yang dibuat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi, dan pada kegiatan pembimbingan BUMDesa oleh pemerintah setempat tidak diajarkan cara membuat laporan keuangan sesuai SAK ETAP tersebut. Hal ini menyebabkan BUMDesa belum mampu menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan dan belum dapat membuat laporan keuangan yang lengkap.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, dengan ini penulis mencoba untuk memberikan suatu masukan atau saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Usaha Milik Desa hendaknya membuat laporan keuangan dengan lengkap sesuai dengan SAK ETAP, agar dapat diketahui posisi keuangan, laba/rugi, perubahan ekuitas, kelancaran arus kas, dan catatan atas laporan keuangan untuk itu hendaknya pihak BUMDesa memilih pengelola yang memiliki pemahaman dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Pemerintah hendaknya mengadakan pelatihan/pembinaan kepada Pengelola BUMDesa untuk penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan, selain itu hendaknya pemerintah membuat aplikasi akuntansi untuk BUMDesa agar memudahkan pengelola dalam menerapkan akuntansi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pertimbangan dengan menambahkan variabel independen yang berbeda serta dapat melakukan penelitian dengan data dan sampel dengan rentan waktu lebih panjang dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Hendra, Agung Praptapa, Christina Tri Setyorini, *The Challenges of Implementation Accounting Standards for Entities without Public Accountability on Small and Medium Entreprises*, 2015.
- Alfurkaniati, Lili Safrida, Nasirwan, Hendra Harmain, Nurlaila, Andriai Lande, Sustinah Limaryani, Fajar Rina Sejati, Muthmainnah, Yana Ermawati, Safrita, *Pengantar Akuntansi I*, Medan: CV Madenatera, 2017.
- Budiandru, *Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 2, No.2, 2018.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal of Rural and Development, Volume 5, No. 1, 2014.
- Efferin, S., Darmadji, S. H., & Tan, Y, *Metode Penelitian Akuntansi, Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Hamzah, Andi Prasetiawan, Akhmad Priharjanto, Dyah Purwanti, *Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dalam Pelaporan Keuangan Pada BUM Desa Tirta Mandiri, Desa Ponggok Klaten*, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 1 No. 3, 2019.
- Harahap, Rahmat Daim, Muhammad Ikhsan Harahap, Meilya Evita Syari, *Pengaruh Dau Dan Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening*, Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, Volume 5 Nomor 2 Ed. Juli–Desember 2019.
- Hariasih, Pipin, Moh. Hudi Setyobakti, Deni Juliasari, *Financial Statement Based On Financial Statements Based On Financial Accounting Standards For Entities Without Public Accountability*, Volume 3 No. 1, 2020.
- Harkaneri, *Urgensi Etika dalam Akuntansi dilihat dari Perspektif Islam*, Volume 4, No. 1, 2013.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

- Ikhsan, Arfan., Misri, *Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Irawati, Dina, Diana Elvianita Martanti, *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis: Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDesa Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDesa Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar. SNAPER-EBIS– Jember, 27-28 Oktober, 2017.*
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Martani, Dwi, Sylvia Veronica Siregar, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya, Taufik Hidayat, 2017, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, cet. xxvi, 2009.
- Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2017.
- Norkamsiah, Agus Iwan Kesuma, Agus Setiawaty, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 13 No. 2, 2016.
- Nugrahaningsih, Putri, Falikhatun, Jaka Winarna, *Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 16, No. 1, 2016.
- Nurlaila & Mutiara, *Penerapan Konsep Akuntansi Syariah Menurut Alqarah ayat 282 dalam PSAK 101*, Kitabah: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, Volume 1 No. 1 Jan-Des 2015.
- Octaviani, Mega Intan, *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (Studi pada Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari di Desa Panggungharjo)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, Suwondo, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume 1 No. 6 h. 1073, 2013.

Ridlwani, Z, *Payung Hukum Pembentukan BUMDesa*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 3, 2013.

Rudianto, *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, Jakarta: Erlangga, 2012.

Rudini, *Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa Langkitin*, Skripsi, Universitas Pasir Pangaraian, 2016.

Siregar, Saparuddin, *Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah; sesuai PSAK 109 untuk BAZNAS dan LAZ*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Supra, Deswati, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Dalam Penyajian Laporan Keuangan*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah, Volume 2 No. 2, 2019.

Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Yusuf, A. M, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Zulkarnaen, Reza M, *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*, Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Volume 5 No. 1, 2016.

Sumber lain:

Amri, Nur Fadhila. *Mengenal Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. www.e-akuntansi.com/sak-etap/, diakses pada 03 Oktober 2020, pukul 13.59.

Team Pelajaran.co.id, *Pengertian Badan Usaha Milik Desa: Ciri, Fungsi, Tujuan, Dasar Hukum, Jenis dan Contoh*. www.pelajaran.co.id/badan-usaha-milik-desa, diakses pada 26 September 2020, Pukul 18.46

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al Wajiz*, <https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html>, diakses pada 14 Juni 2021 pukul 19.30

Wawancara dengan Fitri, Bendahara BUMDesa Harapan Jaya Sukadamai, 25 Mei 2021, pukul 13.30

Wawancara dengan Ahmad Ladoni, Ketua BUMDesa Mandiri Pulo Bandring, 14 Oktober 2020, pukul 16.30 WIB, dan 24 April 2021, pukul 13.30 WIB

Wawancara dengan Sri Astuti, Ketua BUMDesa Bina Usaha Sukamakmur, 29 Januari 2021 & 31 Mei 2021, pukul 11.30

Lampiran 1:

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa nama BUMDesa dan Kapan Berdirinya?
2. Apa usaha yang dijalankan oleh BUMDesa?
3. Apakah pengelola BUMDesa memiliki pengetahuan tentang akuntansi?
4. Apakah pencatatan transaksi sudah mengikuti ketentuan akuntansi seperti jurnal, buku besar, dan akun-akun transaksi lainnya?
5. Apakah BUMDesa membuat laporan keuangan?
6. Apakah laporan keuangan yang dibuat memuat neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan?
7. Apakah laporan keuangan yang disusun selesai tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan?
8. Apakah laporan keuangan yang dibuat telah menggunakan kebijakan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik?
9. Apakah pengelola mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan?
10. Apakah pernah ada pelatihan dari pendamping BUMDesa (pemerintah) untuk pembuatan laporan keuangan?

BADAN USAHA MILIK DESA MANDIRI
LAPORAN RUGI/LABA MICROFINANCE
Periode Per 31 Desember 2020

A- PENDAPATAN ;

| | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Unit Usaha Simpan Pinjam | Rp | 11.510.617 |
| 2. Unit Usaha Jasa Online | Rp | 21.464.000 |
| 3. Distributor | | |
| 4. Unit Usaha Budi daya Ikan | | |
| Jumlah pendapatan | Rp | 32.974.617 |

Oprasional

| | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. ATK dan Lain lain | Rp | 23.079.000 |
|----------------------|----|------------|

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Jumlah pendapatan bersih (S H U) | Rp | 9.895.617 |
|---|-----------|------------------|

B- PEMBAGIAN S H U ;

| No | Uraian Alokasi S H U | Persentase | | Jumlah |
|----------|-----------------------|-------------|-----------|------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | | <i>4</i> |
| | Pendapatan SHU | Rp | | 9.895.617 |
| 1 | Penguatan Modal | 40% | Rp | 3.958.247 |
| 2 | PADES | 60% | Rp | 5.937.370 |
| | | | | |
| | Jumlah | 100% | Rp | 9.895.617 |

Dasar perhitungan adalah Anggaran Dasar Pasal 15 Huruf (D).

Yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Kepala Desa Pulo Bandring Pada Tanggal 13 Februari 2017

BADAN USAHA MILIK DESA MANDIRI
KECAMATAN PULO BANDRING
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
PER 31 DESEMBER 2020

| | | |
|----------------------|----|---------------|
| Modal Alokasi BUMDES | Rp | 254.232.000 |
| Penambahan Modal | Rp | 3.958.247 (+) |
| Total | Rp | 258.190.247 |

SURPLUS TAHUN BERJALAN
SURPLUS DITAHAN TAHUN LALU
TOTAL SURPLUS

Rp 9.895.000

SURPLUS DIBAGI

1. Penguatan Modal BUMDES MANDIRI 40%
2. PADES 60%

Rp. 3.955.000
Rp5.940.000

(+)

Rp 9.895.000

Total
SURPLUS DITAHAN TAHUN INI (Untuk Penambahan Modal SPP)
MODAL AKHIR

258.190.247

Diketahui Oleh
Kepala Desa Pulo Bandring
(Hermansyah Manurung)

Kec. Pulo Bandring tgl 31 Desember 2020
Ditandatangani Oleh
Pengurus BUMDES MANDIRI

Ketua Sekretaris Bendahara

Ditetapkan dan disahkan Oleh
Musyawarah Desa

Diverifikasi Oleh
Badan Pengawas
BUMDES MANDIRI


Lampiran 3:


Laporan Keuangan Bumdes Harapan Jaya Sukadamai

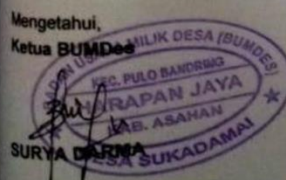
BUMDes : HARAPAN JAYA
UNIT : SPP
DESA : SUKADAMAI

BUKU KAS UMUM
Bulan JANUARI 2018

| TGL | URAIAN | Nomor Bukti | Masuk (Debet) | Keluar (Kredit) | Saldo / Sisa (Debet) |
|--------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Saldo akhir Desember 2017 | | 12.398.100 | | 12.398.100 |
| 08-01-2018 | Diterima dari sri wahni rezky | | 280.000 | | 12.678.100 |
| 08-01-2018 | Diterima dari mualik | | 280.000 | | 12.958.100 |
| 09-01-2018 | Dipinjam ngatiyah | | | 1.000.000 | 11.958.100 |
| 16-01-2018 | Dipinjam erwin | | | 3.000.000 | 8.958.100 |
| | Administrasi | | 30.000 | | 8.988.100 |
| 28-01-2018 | Diterima dari jumadi | | 280.000 | | 9.268.100 |
| 28-01-2018 | Diterima dari suriadi | | 187.000 | | 9.455.100 |
| 30-01-2018 | Dipinjam sarjo | | | 3.000.000 | 6.455.100 |
| 30-01-2018 | Dipinjam suprianto | | | 2.000.000 | 4.455.100 |
| | Administrasi | | 20.000 | | 4.475.100 |
| 31-01-2018 | Penambahan modal spp | | 10.000.000 | | 14.475.100 |
| 31-01-2018 | Dipinjam ke tumijo | | | 10.000.000 | 4.475.100 |
| | Administrasi | | 100.000 | | 4.575.100 |
| 31-01-2018 | Diterima dari yenni s | | 374.000 | | 4.949.100 |
| 31-01-2018 | Diterima dari marianto | | 280.000 | | 5.229.100 |
| 31-01-2018 | Diterima dari suherman | | 280.000 | | 5.509.100 |
| 31-01-2018 | Diterima dari junaidi | | 280.000 | | 5.789.100 |
| 31-01-2018 | Diterima dari hermanto | | 280.000 | | 6.069.100 |
| 31-01-2018 | Diterima dari suratno | | 374.000 | | 6.443.100 |
| SALDO AKHIR | | | 25.443.100 | 19.000.000 | 6.443.100 |

Sukadamai, 31 Januari 2018
Bendahara

SITI RAMAYANTI

Mengetahui,
Ketua BUMDes

SURYA DARMA



Lampiran 3:**Laporan Keuangan Bumdesa Bina Usaha Sukamakmur****BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) "BINA USAHA"****LAPORAN NERACA****PERIODE PER 31 DESEMBER 2016**

| AKTIVA | | | | PASIVA | | |
|---------------|-------------------------------|------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Harta | | | 1 | Hutang | |
| 1.1 | Kas | | | | Surflus | |
| 1.1.1 | Kas Operasional BUMDesa | | | | Dana Sosial | |
| 1.1.2 | Kas Pengembalian SPP BUMDesa | 4,890,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | Total Kas | | 4,890,000 | | | |
| 1.2 | Bank | | | 2 | Modal | |
| 1.2.1 | Bank Operasional BUMDesa | | | 2.1 | Alokasi Modal BUMDes | 130,815,550 |
| 1.2.2 | Bank Pengembalian SPP BUMDesa | 94,359,572 | | | | |
| | | | | | | |
| | Total Bank | | 94.359.572 | | | |
| | | | | | | |
| 1.3 | Saldo Pinjaman | | | | | |
| 1.3.1 | Pinjaman SPP | 31,565,978 | | | | |
| | | | 31,565,978 | | | |
| 1.4 | Biaya di Bayar di Muka | | | | | |
| 1.5 | Inventaris/Aktiva Tetap | | | | | |
| 1.6 | Aktiva Lainnya | | | | | |
| | Total Aktiva | | 130,815,550 | | Total Pasiva | 130,815,550 |

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "BINA USAHA"

UNIT USAHA "SPP"

BUKU KAS HARIAN

PERIODE APRIL 2016

Desa : Sukamakmur

Kecamatan : Pulo Bandring

Kabupaten : Asahan

| NO | TANGGAL TRANSAKSI | URAIAN TRANSAKSI | NOMOR TRANSAKSI | PEMASUKAN | | | SETOR KE REKENING | PINJAMAN | KAS OPS PENGURUS | ALOKASI SURPLUS | | | LAIN - LAIN | SALDO |
|----|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|------|---------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------|----------|------------|-------------|------------|
| | | | | POKOK | JASA | TARIK DARI REKENING | | | | LAIN-LAIN | TABUNGAN | KAS BUMDES | | |
| | | Transaksi Bulan Lalu | | | | | 40.375.000 | | | | | | 40.375.000 | |
| 1 | 28-Apr-16 | Tran dari Rekening BUMDes | 01/KM/MD/04/16 | | | | | | | | | | | 40.000.000 |
| | | Dipinjaman kepada | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 28-Apr-16 | Tumrah | 01/KM/MD/04/16 | | | | | | 1.000.000 | | | | | 39.000.000 |
| 3 | 28-Apr-16 | Muslika Irawati | 02/KM/MD/04/16 | | | | | | 1.000.000 | | | | | 38.000.000 |
| 4 | 28-Apr-16 | Saur H. LBN, Tobing | 03/KM/MD/04/16 | | | | | | 1.000.000 | | | | | 37.000.000 |
| 5 | 28-Apr-16 | Tukiman | 04/KM/MD/04/16 | | | | | | 500.000 | | | | | 36.500.000 |
| 6 | 28-Apr-16 | Ade Kurniawan Dana | 05/KM/MD/04/16 | | | | | | 500.000 | | | | | 36.000.000 |
| 7 | 28-Apr-16 | Mahur | 06/KM/MD/04/16 | | | | | | 500.000 | | | | | 35.500.000 |
| 8 | 28-Apr-16 | Jumirin | 07/KM/MD/04/16 | | | | | | 1.000.000 | | | | | 34.500.000 |
| 9 | 28-Apr-16 | Sh Wahyuni | 08/KM/MD/04/16 | | | | | | 500.000 | | | | | 34.000.000 |
| 10 | 28-Apr-16 | Indah Sari | 09/KM/MD/04/16 | | | | | | 500.000 | | | | | 33.500.000 |
| 11 | 28-Apr-16 | Guntur | 10/KM/MD/04/16 | | | | | | 500.000 | | | | | 33.000.000 |
| 12 | 28-Apr-16 | Sutrisno | 11/KM/MD/04/16 | | | | | | 1.000.000 | | | | | 32.000.000 |
| 13 | 28-Apr-16 | Agus Suyono | 12/KM/MD/04/16 | | | | | | 1.000.000 | | | | | 31.000.000 |
| 14 | 28-Apr-16 | Netti Herawati | 13/KM/MD/04/16 | | | | | | 1.000.000 | | | | | 30.000.000 |
| 15 | 28-Apr-16 | Misnani | 14/KM/MD/04/16 | | | | | | 1.000.000 | | | | | 29.000.000 |
| 16 | 28-Apr-16 | Parida Ramadani | 15/KM/MD/04/16 | | | | | | 500.000 | | | | | 28.500.000 |
| 17 | 28-Apr-16 | Dewi Rahayu | 16/KM/MD/04/16 | | | | | | 500.000 | | | | | 28.000.000 |
| 18 | 28-Apr-16 | Yusea Nuddin | 17/KM/MD/04/16 | | | | | | 500.000 | | | | | 27.500.000 |
| 19 | 28-Apr-16 | Nunangsih | 18/KM/MD/04/16 | | | | | | 500.000 | | | | | 27.000.000 |
| 20 | 28-Apr-16 | Novita Aggreyani | 19/KM/MD/04/16 | | | | | | 500.000 | | | | | 26.500.000 |
| 21 | 28-Apr-16 | Rismawati Sinaga | 20/KM/MD/04/16 | | | | | | 1.000.000 | | | | | 25.500.000 |
| 22 | 28-Apr-16 | Leo Candra | 21/KM/MD/04/16 | | | | | | 1.000.000 | | | | | 24.500.000 |
| 23 | 28-Apr-16 | Latifah | 22/KM/MD/04/16 | | | | | | 1.000.000 | | | | | 23.500.000 |
| 24 | 28-Apr-16 | Mega Helirani | 23/KM/MD/04/16 | | | | | | 1.000.000 | | | | | 22.500.000 |
| 25 | 28-Apr-16 | Nurhayati | 24/KM/MD/04/16 | | | | | | 1.000.000 | | | | | 21.500.000 |
| 26 | 28-Apr-16 | Widya Hib | 25/KM/MD/04/16 | | | | | | 1.000.000 | | | | | 20.500.000 |
| 27 | 28-Apr-16 | Suheri | 26/KM/MD/04/16 | | | | | | 1.000.000 | | | | | 19.500.000 |
| 28 | 28-Apr-16 | Yanti | 27/KM/MD/04/16 | | | | | | 500.000 | | | | | 19.000.000 |
| 29 | 28-Apr-16 | Rahmat Hidayat | 28/KM/MD/04/16 | | | | | | 500.000 | | | | | 18.500.000 |
| 30 | 28-Apr-16 | Suriani | 29/KM/MD/04/16 | | | | | | 500.000 | | | | | 18.000.000 |
| 31 | 28-Apr-16 | Malik | 30/KM/MD/04/16 | | | | | | 500.000 | | | | | 17.500.000 |

Lampiran 4:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Devinta Indah Sari Sinaga

Nim : 0502171069

Tpt/Tgl Lahir : Tinjowan, 22 Maret 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun III Suka Makmur, Kec. Pulo Bandring, Kab. Asahan

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tamatan MIN Sayur Mattinggi Berijazah tahun 2011

Tamatan SMP Negeri 1 Ujung Padang Berijazah tahun 2014

Tamatan SMKS Citra Abdi Negero Berijazah tahun 2017

3. RIWAYAT ORGANISASI

Dewan Eksekutif Mahasiswa FEBI Tahun 2017

Relawan Nusantara Medan XII Tahun 2018